



Jukir Sepakat Tarif Parkir Naik

UMBULHARJO (MERAPI) - Kenaikan tarif parkir yang akan diterapkan tahun 2020 disambut baik para juru parkir (jukir) di Kota Yogyakarta. Namun para jukir mengkhawatirkan tarif parkir yang berlaku progresif pada Tepi Jalan Umum (TJU) sulit diterapkan karena terkendala alat untuk menghitung durasi parkir.

"Kami setuju dengan kenaikan tarif parkir itu. Tapi penerapannya untuk progresif sulit karena harus mencantumkan durasi parkir. Proses itu yang sulit bagi pelaku jukir di TJU," kata Ketua Forum Pekerja Parkir Kota Yogyakarta, Ignatius Hanarto, Kamis (24/1).

Selama ini untuk parkir TJU di Kota Yogyakarta menggunakan tarif flat atau satu tarif sekali parkir. Sedangkan dengan perda retribusi parkir TJU, tarif progresif akan diterapkan pada parkir kawasan satu.

Kawasan satu adalah kawasan yang disediakan untuk melayani dan menunjang kegiatan wisata dan kegiatan perdagangan dengan intensitas ekonomi tinggi. Misalnya pada parkir TJU kawasan 1 sepeda motor dikenai Rp 2.000 untuk 2 jam pertama dan selanjutnya progresif Rp 1.500/jam.

Dia menyatakan para jukir di TJU tidak memiliki alat pendukung untuk menghitung durasi parkir kendaraan, sehingga sulit diterapkan. Untuk

itu pihaknya berharap nantinya Pemkot Yogyakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bisa memfasilitasi alat pendukung untuk menghitung durasi parkir progresif.

"Selama ini kendaraan yang parkir di TJU rata-rata kurang dari dua jam. Harapan kami alat pendukung untuk menghitung parkir progresif bisa difasilitasi," tambahnya.

Selain itu dari sisi kemampuan para jukir TJU untuk melaksanakan parkir progresif. Menurutnya jukir di TJU tidak seperti di Tempat Khusus Parkir (TKP) yang selama ini sudah menerapkan progresif. Rata-rata sumber daya manusia parkir di TJU, lanjutnya, sudah tua.

Dia mengaku akan mencoba melakukan sosialisasi ke pelaku jukir agar tarif bisa optimal. "Kami sepakat dengan kenaikan tarif dan penerapan progresif. Tapi tidak bisa *saklek* diterapkan, semua tergantung titik-titik keramaian lokasi parkir dan tinggal masyarakat bisa menerima tidak dengan parkir progresif," terang Hanarto.



MERAPI-TRI DARMIYATI

Seorang jukir saat mengatur kendaraan di Jalan Margo Utomo Yogyakarta.

Sedangkan kenaikan tarif parkir pada TKP milik Pemkot, dia menilai tidak ada kendala karena selama ini sudah menerapkan progresif. Mengingat durasi kendaraan yang parkir di TKP seperti bus-bus besar pariwisata bisa berjam-jam. Tapi diakui penerapan parkir progresif di TKP belum menggunakan alat penghitung durasi parkir. "Masih flat. Tarifnya dipukul rata durasi parkir di TKP," ujarnya.

Sementara itu Kepala Bagian

Hukum Pemkot Yogyakarta Basuk Hari Saksana menyampaikan, fasilitasi perda retribusi parkir TJU dan TKP di Pemda DIY belum selesai. Dia menjelaskan untuk perda terkait retribusi dan pajak proses fasilitasi di provinsi serta Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan fasilitasi perda induk perpajakan sudah selesai.

"Raperda retribusi fasilitasi di Pemda DIY memang lama karena sampai ke pemerintah pusat

untuk disinkronkan. Dimungkinkan isi perda masih bisa berubah. Tapi bukan mengubah nilai substansial di perda," tutur Basuki.

Ditambahkan untuk ruas-ruas jalan yang masuk parkir kawasan I, II dan III akan diatur dalam peraturan walikota. Pemetaan ruas jalan sudah disiapkan, tapi penyusunan secara resmi masih menunggu proses fasilitasi perda retribusi TJU dan TKP selesai dan diundangkan. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 05 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005